

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tiap individu berhak mendapatkan hidup yang layak baik itu dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk salah satunya mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di Rumah Sakit, Apotek maupun Puskesmas. Sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, meningkatkan keamanan penggunaan obat dan efisiensi biaya obat serta dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang sesuai dengan praktek pelayanan kefarmasian yang baik (*Good Pharmacy Practices*) (Kemenkes RI, 2006). Sehingga Kemenkes RI (2011) menetapkan indikator terkait dengan penggunaan obat yang rasional yang berdasarkan pada WHO 1993 meliputi Indikator Peresepan, Indikator Pelayanan Pasien, dan Indikator Fasilitas. Pada Indikator Pelayanan Pasien terdapat 5 parameter yang meliputi *consultation time*, *dispensing time*, persentase obat yang diresepkan secara aktual, persentase obat dengan pelabelan cukup, dan persentase pasien yang memahami regimen obat.

Tahun 2017 Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencatatkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran kerjanya, dimana dari 36 indikator pada 12 sasaran kinerja, hanya terdapat 34 indikator kinerja yang memiliki kinerja yang sesuai atau memenuhi target

yang ditetapkan. Salah satu sasaran kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas (Kemenkes RI, 2017b).

Sedangkan dari sasaran kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian adalah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan penggunaan obat rasional di Puskesmas, dimana Direktorat Pelayanan Kefarmasian melakukan penyempurnaan indikator kinerja Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yang sebelumnya indikator kinerja tersebut adalah persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas menjadi persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penggunaan obat rasional di Puskesmas. Kabupaten/Kota yang melaksanakan penggunaan obat rasional di Puskesmas adalah Kabupaten/Kota yang 20% Puskesmasnya memiliki nilai rata-rata penggunaan obat rasional minimal 60% (Kemenkes RI, 2019).

Pada tahun 2017 Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah mencatat keberhasilan dalam pencapaian pelayanan kesehatan di Indonesia, dimana tahun 2017 pelayanan kefarmasian yang sesuai standar sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50,01% dan pencapaian persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas telah mencapai target sebesar 30,35%. Namun masih terdapat hasil yang belum maksimal terutama di berbagai Provinsi seluruh Indonesia, ini dilihat dari laporan kinerja tahunan Direktorat Pelayanan Kefarmasian yang menyatakan bahwa 17 Provinsi dari 34 Provinsi sudah mencapai target penggunaan obat rasional yang telah ditetapkan (Kemenkes RI, 2017b;

Kemenkes RI, 2018). Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami perubahan salah satunya perkembangan jumlah Puskesmas dan mutu pelayanannya, serta untuk penggunaan obat rasional di Provinsi Jawa Tengah belum mencapai target (Dinkes Jateng Prov, 2017).

Beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pencapaian sasaran kerjanya yaitu masih ada kesenjangan cakupan antar Provinsi, belum meratanya jumlah tenaga kesehatan atau masih kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Provinsi, Kabupaten/Kota (Kemenkes RI, 2017b). Misalnya di Kota Semarang pada tahun 2018 dalam pelayanan kefarmasiannya memiliki jumlah sumber daya manusia 49 tenaga kefarmasian yang terdiri dari 9 Apoteker dan 40 Asisten Apoteker, dimana ke 49 tenaga kefarmasian tersebut tersebar tidak merata di berbagai Puskesmas di Kota Semarang (Dinas Kesehatan, 2019a).

Untuk mengatasi kendala dan penurunan kinerja tersebut, maka Direktorat Pelayanan Kefarmasian telah menyusun rencana untuk meningkatkan mutu pelayanan dan penggunaan obat yang rasional serta pemerintah juga bertanggung jawab dalam peningkatan penggunaan obat secara rasional diantaranya dengan cara penguatan manajerial, regulasi, edukasi dan sistem monitoring evaluasi salah satunya melalui pelayanan kefarmasian di puskesmas (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016; Kemenkes RI, 2017a).

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan pasien di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon

Kota Semarang. Peneliti memilih tempat Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon karena Puskesmas tersebut memiliki letak yang strategis dekat dengan masyarakat, masuk dalam kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan merupakan puskesmas yang sudah memiliki rawat inap. Serta dilihat dari derajat kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga kefarmasian yang berbeda antara Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon.

Salah satu upaya yang wajib dilaksanakan oleh setiap puskesmas adalah evaluasi penggunaan obat rasional karena penggunaan obat rasional merupakan hal utama dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ini akan berperan dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional sehingga akan menunjang keberhasilan pengobatan guna dapat tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016; Ihsan dkk., 2017). Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Obat Rasional Berdasarkan Indikator Pelayanan di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang sebagai tempat penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :“Bagaimana penggunaan obat rasional di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang jika dilihat dari indikator pelayanan pasien?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan obat yang rasional di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1.3.2.1. Untuk mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang yang meliputi rata-rata waktu penyiapan obat hingga rata-rata waktu penyerahan obat (*dispensing time*), rata-rata waktu konsultasi pasien, persentase obat yang diresepkan secara aktual, persentase obat dengan pelabelan cukup dan persentase pasien yang memahami regimen obat.
- 1.3.2.2. Untuk mengetahui gambaran penggunaan obat yang rasional di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang yang dilihat berdasarkan indikator pelayanan.
- 1.3.2.3. Untuk mengetahui pemahaman pasien terhadap regimen obat yang disampaikan oleh tenaga kefarmasian di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang melalui wawancara langsung kepada pasien.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi melalui hasil analisisnya untuk kepentingan penelitian berikutnya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian terutama dalam kerasionalan penggunaan obat di Puskesmas.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Kota Semarang dalam pelayanan pasien guna mencapai penggunaan obat yang rasional dan sebagai masukan untuk meningkatkan pengadaan tenaga apoteker di Puskesmas.

1.4.2.2. Bagi Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan serta pegawai khususnya apoteker Puskesmas di Kota Semarang dapat untuk meningkatkan pelayanan pasien sehingga meningkatkan kerasionalan penggunaan obat bagi masyarakat.

1.4.2.3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengukur dan mengetahui kontribusi tenaga kefarmasian dalam

memberikan informasi serta pelayanan kefarmasian pada masyarakat di Puskesmas Ngaliyan dan Puskesmas Tlogosari Kulon guna mencapai penggunaan obat yang rasional.